

Manual Indikator Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Sasaran Kegiatan

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Yang Berkualitas

Deskripsi SP

Upaya untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan dengan mengembangkan hub bisnis untuk produk kelautan dan perikanan di luar negeri yang didukung oleh pengelolaan prasarana logistik, peningkatan mutu serta pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mencapai nilai ekspor hasil perikanan dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk sesuai target pada RKP 2024. Ekspor merupakan devisa bagi negara. Tercatat bahwa, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,76% dari US\$ 3,9 Miliar menjadi US\$ 4,94 Miliar. Dalam Sasaran RKP terkait Kelautan dan Perikanan tertuang salah satu target Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa, dimana Ekspor hasil perikanan sebesar 6,05 USD Miliar untuk Tahun 2021 dan 8,0 Miliar USD pada Tahun 2024 serta Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dimana Angka Konsumsi ikan mencapai 62 kg/kapita/tahun pada Tahun 2024

Indikator Kinerja

: Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing yang ditindaklanjuti

Deskripsi Indikator Kinerja

Definisi:
Terdapat 3 Rumusan Kebijakan pada indikator kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Peningkatan Daya Saing Yang Ditindaklanjuti dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing rumusan kebijakan tersebut:

- 1. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan**
Tata kelola sistem rantai pasok dingin yang terintegrasi dan komprehensif yang dimulai dari standarisasi infrastruktur dan sarpras pelabuhan perikanan, proses produksi KP, baik untuk tujuan domestic maupun ekspor sehingga diperlukan suatu langkah strategis guna menciptakan keterpaduan antara sentra produksi kelautan dan perikanan.
- 2. Deskripsi Rumusan Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**
Kegiatan ekspor maupun impor produk perikanan dan kelautan membutuhkan standar berbeda yang diterapkan oleh masing-masing negara, namun tidak sejalan dengan yang diterapkan oleh beberapa industri, sehingga hal ini kadang kala menyebabkan terjadinya penolakan produk perikanan dan kelautan Indonesia di negara importir. Tuntutan Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan kelautan oleh Internasional semakin meningkat sehingga dengan meningkatkan kualitas mutu produk KP dan sistem jaminan mutu yang akan berdampak positif pada harga jual dan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia
- 3. Deskripsi Rumusan Kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan**
Mengembangkan hub bisnis untuk produk kelautan dan perikanan di luar negeri. Hambatan yang dialami oleh ekspor perikanan Indonesia yakni semakin ketatnya persyaratan impor (non tarif) dan tingginya tarif bea masuk di negara tujuan. Negara tujuan ekspor Indonesia yang utama adalah Amerika Serikat, China,

Jepang, ASEAN dan Uni Eropa dimana komoditas utama ekspor perikanan Indonesia adalah udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, ranjungan-kepiting dan rumput laut

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang ditindaklanjuti (3)}}{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang dihasilkan (3)}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, k
pengendalian, dan implementasi kebijakan terkait peningkatan da

Satuan Pengukuran

: Persentase

Unit Penanggung jawab

: Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Perdagangan;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Perhubungan;
5. *Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*
6. AKKI
7. ALFI
8. Pemda

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Luar Negeri;
4. Kementerian Perdagangan;
5. UN
6. AP5I

Unit/Pihak Penyedia Data :

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Luar Negeri;
5. Kementerian BUMN
6. Kementerian Keuangan;
7. Badan Karantina Indonesia
8. Nusantara Aquatic
9. AP5I
10. INAFISH

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan

1. Data Ekspor Hasil Perikanan yang dikeluarkan KKP
2. Data Ekspor Impor Nasional yang diterbitkan oleh BPS
3. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Harmonized System diterbitkan secara bulanan oleh BPS

Sumber Data

: **Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**

1. Data Ekspor Hasil Perikanan yang dikeluarkan KKP
2. Data Ekspor Impor Nasional yang diterbitkan oleh BPS
3. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Harmonized System diterbitkan secara bulanan oleh BPS

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

1. Data Ekspor Hasil Perikanan yang dikeluarkan KKP
2. Data Ekspor Impor Nasional yang diterbitkan oleh BPS
3. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Harmonized System diterbitkan secara bulanan oleh BPS

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Plt. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Andreas Albertino Hutahaean, S.Pi., M.Sc., Ph.D.

IKU 02

**Manual Indikator Kinerja
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing**

Sasaran Program (SP)

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Yang Berkualitas

Deskripsi SP

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Yang Berkualitas adalah dengan koordinasi Kemitraan untuk mendukung Agenda Pembangunan Biru Nasional. Agenda Biru Nasional sebagai platform kolaborasi untuk mencapai pembangunan sumber daya maritim dan kelautan secara berkelanjutan demi tercapainya kesetaraan, pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta kesejahteraan manusia. Kemitraan ini bertujuan untuk membantu percepatan kemajuan untuk mencapai target pembangunan Pemri pada Agenda Biru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini termasuk memperkuat sinergi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait dan mendukung agenda global seperti the UN Decade on Ecosystem Restoration dan the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development serta Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kemitraan berfokus pada empat pilar utama: Kesehatan Biru, Pangan Biru, Inovasi Biru, dan Keuangan Biru

Indikator Kinerja

: Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan

Deskripsi Indikator Kinerja :**Definisi:**

Kemitraan berfokus pada empat pilar utama: Kesehatan Biru, Pangan Biru, Inovasi Biru, dan Keuangan Biru. Untuk mewujudkan tujuan Kemitraan ini, rencana aksi atau pengaturan pelaksanaan yang memuat rencana kerja secara terperinci akan dirumuskan untuk memandu pelaksanaan kegiatan Kemitraan.

1. Kesehatan Biru

Mendorong pendekatan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan, melalui penerapan pengelolaan laut terpadu, dengan fokus pada tata kelola, koherensi kebijakan, pengetahuan berbasis sains untuk perencanaan dan keuangan berkelanjutan. Pemulihan ekosistem pesisir merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kesehatan wilayah pesisir yang dapat mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, lingkungan hidup yang sehat di masyarakat dan mempromosikan kegiatan terkait pariwisata dan perjalanan; dengan demikian, memajukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan

2. Pangan Biru

Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, termasuk penangkapan ikan skala kecil dan petani budidaya tradisional, dengan penerapan sistem dan kuota penangkapan dan penangkapan ikan yang lebih baik, untuk memastikan pengembangan budidaya dan perikanan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan peran pangan biru di sistem ketahanan pangan nasional dan peningkatan ketahanan iklim bagi masyarakat pesisir

3. Inovasi Biru

Meningkatkan kapasitas negara untuk mengelola, menggunakan dan mengembangkan sumber daya berbasis laut secara berkelanjutan dan mempromosikan inovasi dan pembangunan melalui sains, teknologi, dan transformasi digital

4. Keuangan Biru

Meningkatkan investasi dalam ekonomi biru sangat penting bagi Indonesia untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi dan menciptakan mesin ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan siapa pun. Memobilisasi keuangan publik dan swasta secara eksternal dan internal sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan dan program agenda biru nasional

Formula:	
$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan (1)}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan (1)}} \times 100\%$	
Tujuan:	
Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian isu strate	

Satuan Pengukuran :

Unit Penanggung jawab :

Unit/Pihak Penyedia Data :
 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 2. Kementerian Bappenas
 3. UN
 4. FAO
 5. ILO

Sumber Data :
 1. Dokumen Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional

Jenis Konsolidasi Periode :

Jenis Konsolidasi Lokasi :

Polarisasi Indikator Kinerja :

Periode Pelaporan :

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Pit. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Andreas Albertino Hutahaeen, S.Pi., M.Sc., Ph.D.